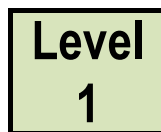
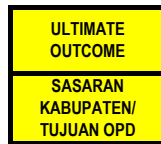


POHON KINERJA BADAN KE



**Level
2**

**Level
3**

Fenomena
a. Permendagri No.2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di Daerah b. Permendagri No.46 Tahun 2019 tentang perubahan atas permendagri No. 2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan Dini di Daerah c. Permendagri No.11 Tahun 2019 tentang perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik d. Keputusan Bupati Lumajang No. 188,45/23/427,12/2023 Tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan.
Sasaran
Meningkatkan Kewaspadaan ATHG di Daerah
Indikator
Pesentase Deteksi dini dan Cegah Dini

Level 4

Fenomena
a. PP Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah b. Permendagri No,11 Tahun 2019 tentang perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik c. Keputusan Bupati Lumajang No. 188,45/505/427,12/2023 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Sasaran
Fasilitasi Forkopimda
Indikator
Terfasilitasinya kegiatan FORKOPIMDA

Fenomena
Pasal 1 Ayat 4 Permendagri No.46 Tahun 2019 tentang perubahan atas permendagri No. 2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan Dini di Daerah
Sasaran
Pembentukan Tim Wasda
Indikator
terbitnya Surat Keputusan Bupati Lumajang Tentang Tim Wasda

Fenomena
Pasal 16 Ayat 2 Permendagri No.46 Tahun 2019 tentang perubahan atas permendagri No. 2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan Dini di Daerah
Sasaran
Pembentukan FKDM
Indikator
terbitnya Surat Keputusan Bupati terkait FKDM

Level 5

Fenomena
Pasal 2 ayat 3 PP Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Sasaran
Peningkatan koordinasi unsur Forkopimda
Indikator
persentase koordinasi unsur Forkopimda

Fenomena
Pasal 14 Ayat 1,2,3 dan 4 Permendagri No,2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di Daerah
Sasaran
Peningkatan koordinasi dengan unsur yang terkait kewaspadaan di Daerah
Indikator
persentase koordinasi dengan unsur yang terkait kewaspadaan di Daerah

Fenomena
Kurang optimalnya koordinasi dengan elemen Masyarakat di Wilayah
Sasaran
Peningkatan koordinasi dengan unsur masyarakat di Daerah
Indikator
persentase koordinasi dengan unsur Masyarakat di Daerah

SATUAN BANGSA DAN POLITIK

Fenomena
Munculnya masalah strategis
Sasaran
Meningkatnya Penanganan Masalah Strategis
Indikator
Persentase masalah strategis yang ditangani

Fenomena
Masih Tingginya masalah IPOLEKSOSBUD (Data masalah IPOLEKSOSBUD Tahun 2022 sebanyak 366 masalah)
Sasaran
Rendahnya Masalah IPOLEKSOSBUD
Indikator
Prosentase Masalah yang muncul

Fenomena
TINGGINYA POTENSI MASALAH IPOLEKSOSBUD (Potensi masalah IPOLEKSOSBUD yang teridentifikasi pada tahun 2022 sebanyak 976 masalah)
Sasaran
Menurunnya potensi masalah
Indikator
Persentase penurunan potensi masalah

Fenomena
a. Permendagri No.2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di Daerah b. Permendagri No.46 Tahun 2019 tentang perubahan atas permendagri No. 2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan Dini di Daerah c. Permendagri No,11 Tahun 2019 tentang perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik d. Keputusan Bupati Lumajang No. 188,45/23/427,12/2023 Tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan.
Sasaran
Meningkatnya Penanganan konflik sosial
Indikator
Persentase penanganan konflik sosial

Fenomena
Rendahnya Partisipasi masyarakat pada Pemilu tahun 2024 sebesar 82,70%
Sasaran
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilu kepala daerah
Indikator
Persentase Partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah

Fenomena
Instruksi presiden No.2 Tahun 2020 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Tahun 2020-2024.
Sasaran
Pembentukan Tim Terpadu P4GN-PN
Indikator
terbitnya Surat Keputusan Bupati Lumajang Tentang Tim Terpadu P4GN

Fenomena
Permendagri RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN dan PN
Sasaran
Peningkatan koordinasi P4GN di Daerah
Indikator
persentase koordinasi P4GN di Daerah

Fenomena
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Agama masing-masing No. 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006
Sasaran
Fasilitasi FKUB
Indikator
Terfasilitasinya FKUB

Fenomena
kurang optimalnya koordinasi internal dan eksternal keagamaan di Daerah
Sasaran
Peningkatan koordinasi internal dan eksternal keagamaan di Daerah
Indikator
persentase koordinasi FKUB di Daerah

Fenomena
BAB III KEWENANGAN Pasal III Ayat III permendagri 42 tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial
Sasaran
Pembentukan Tim Terpadu PKS
Indikator
terbitnya Surat Keputusan Bupati Lumajang Tentang Timdu PKS

Fenomena
kurang optimalnya mengelola konflik sosial melibatkan strategi multi-sisi yang mencakup kerangka hukum, koordinasi kelembagaan, keterlibatan masyarakat, dan langkah-langkah antisipatif.
Sasaran
Peningkatan PKS di Daerah
Indikator
persentase PKS di Daerah

Fenomena
Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Tahun 2024 sejumlah 82,70% (data KPU Lumajang)
Sasaran
Pembentukan Demokrasi di Lumajang
Indikator
Persentase masyarakat yang mengikuti pelaksanaan pendidikan politik

Fenomena
Masih rendahnya pemahaman pendidikan politik
Sasaran
Peningkatan Pendidikan Politik
Indikator
Persentase Pendidikan Politik